

## PENERAPAN TEORI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN IPAL KOMUNAL DI JAKARTA

Fadly Haley Tanjung  
Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
e-mail: [fadly.haleytanjung@jakarta.go.id](mailto:fadly.haleytanjung@jakarta.go.id)

### ABSTRACT

*SANIMAS-IsDB Program was initiated by the Ministry of Public Works and Housing during 2015-2018 and Jakarta Capital City Government had contributed to build Communal WWTP in 23 locations. Bappenas (2018) showed that 96% of water body in Jakarta has been highly polluted and based on Environment Agency's data in 2018, 72,7% contributions of that come from domestic wastewater. To make it operates well, a good and sustainable operation management required. According to PPAPP Agency, the best operating plant located in RW.01 Rawajati, Pancoran, Jakarta. Management operational indicators of Communal WWTP related to public administration theory. Gulick in Ahmad (2015) stated the aspects called POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). These management aspects need to be elaborated with limitations in infrastructure management (Naipospos, 2019). Research Method that applied was qualitative descriptive, with preceded by literature study. The results were certain indicators that affects sustainable operational of the plant, and its relation with public administration theory, as follows: 1) The importance of stakeholders' participation-related with aspect P, S, O and C; 2) Operation and maintenance costs-related to aspect O and B; 3) Technical design-related to aspect P; and 4) Social aspect-related to aspect R. Based on this, research conclusion is that stakeholders' participation, technical design and social aspect are indicators related to P, S, O, C and R aspect, needs to be maintain to make a sustainable management. Otherwise, the operation and maintenance cost indicator related to aspect B, need to solve, increase, and become more priority in the management.*

**Keywords:** *Sustainability, Communal WWTP, public administration, POSDCORB.*

### ABSTRAK

Program SANIMAS-IsDB diinisiasi oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2018 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membangun IPAL Komunal di 23 lokasi. Data Bappenas (2018) menunjukkan bahwa 96% badan air di Jakarta tercemar berat dan menurut data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018, sumber pencemar air limbah terdapat di permukiman sekitar 72,7%. Untuk mengoperasional IPAL Komunal dengan baik, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Menurut Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), IPAL Komunal yang berkinerja baik berlokasi di RW. 01, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta. Indikator pengaruh keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal berkaitan dengan teori administrasi publik. Menurut Gulick dalam Ahmad (2015), teori tersebut dituangkan dalam aspek yang disebut POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Aspek pengelolaan tersebut perlu dikaji dengan limitasi dalam manajemen infrastruktur (Naipospos, 2019). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif secara deskriptif, yang didahului dengan studi literatur. Hasil studi literatur diketahui bahwa indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal dan kaitannya dengan teori administrasi publik, yaitu: 1) Pentingnya peran *stakeholders*-berkaitan dengan aspek P, S, O dan C; 2) Biaya perawatan dan pemeliharaan-berkaitan dengan aspek O dan B; 3) Desain teknis-berkaitan dengan aspek P, dan 4) Aspek sosial-berkaitan dengan aspek R. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pentingnya

peran serta *stakeholders*, desain teknis IPAL dan aspek sosial warga merupakan indikator yang perlu dipertahankan khususnya aspek P, S, O, C dan R untuk mewujudkan pengelolaan IPAL Komunal yang berkelanjutan. Sedangkan indikator biaya perawatan dan pemeliharaan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya terkait aspek B dan belum menjadi prioritas dalam pengelolaan IPAL Komunal.

**Kata kunci:** Keberlanjutan, IPAL Komunal, administrasi publik, POSDCORB.

## Pendahuluan

Penanganan sektor sanitasi merupakan salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dimana terdapat target 100% akses sanitasi yang layak di perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2003 menyelenggarakan Program Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun ruang lingkup penelitian ini adalah program yang pembiayaannya menggunakan dana pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank* (IsDB), sehingga program ini selanjutnya disingkat SANIMAS-IsDB. Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Program SANIMAS-IsDB Tahun 2018, salah satu output program ini adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

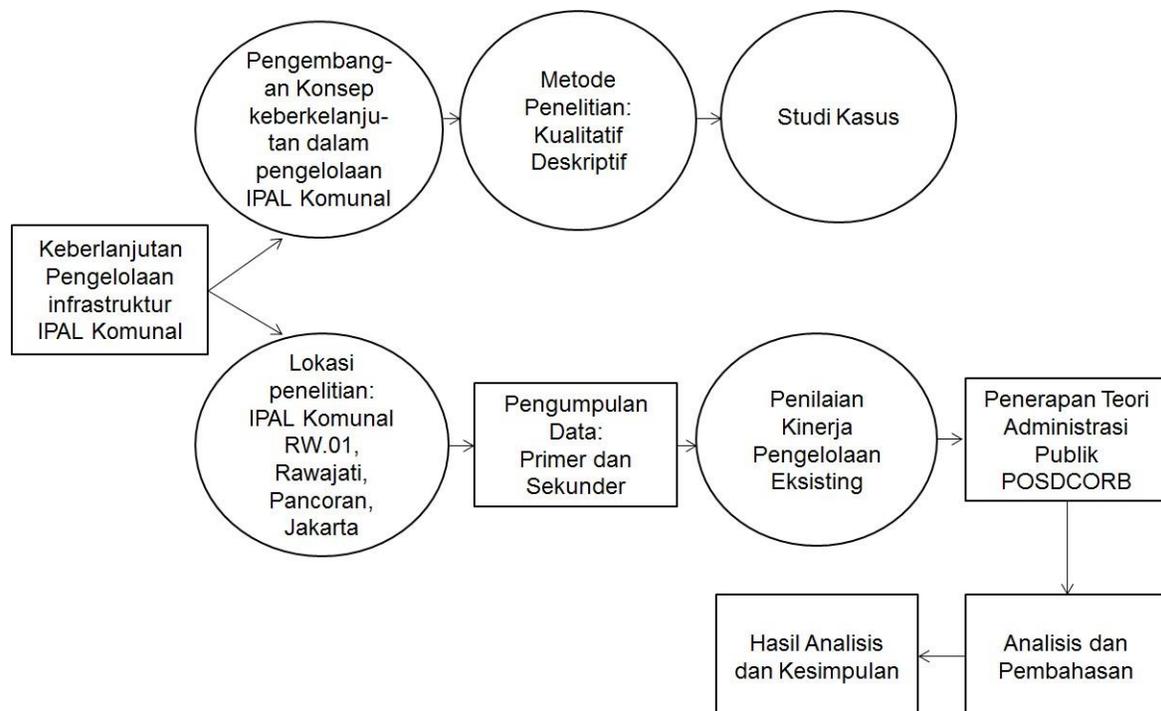
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan serta dalam Program SANIMAS-IsDB selama 4 tahun (2015-2018). Pada rentang waktu tersebut dibangun IPAL Komunal di 23 lokasi tersebar di 5 (lima) wilayah kota administrasi. Salah satunya adalah di RW. 01, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. IPAL Komunal di lokasi ini adalah salah satu IPAL yang berkinerja baik menurut hasil wawancara Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Pada lokasi ini, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) berjalan dengan baik dan terdapat peningkatan jumlah sambungan rumah yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Tujuan pembangunan IPAL Komunal adalah mengurangi pencemaran sungai dan air tanah yang banyak terjadi di perkotaan. Berdasarkan hasil pemantauan BPLHD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 sebanyak 90% sungai di Jakarta telah tercemar oleh bakteri *escherichia coli* (e-coli). Untuk dapat beroperasi dengan baik agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan atau manajemen yang baik di IPAL Komunal. Sebelumnya perlu diketahui dulu apa saja indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal. Kemudian perlu diketahui gambaran mengenai pengelolaan di IPAL Komunal ini meliputi aspek Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penyusunan Tenaga Kerja (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*). Keseluruhan aspek pengelolaan tersebut selanjutnya perlu dinilai kinerjanya untuk mengetahui indikator pengaruh keberlanjutan apa saja yang mempengaruhi pengelolaannya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk pengelolaan di masa mendatang.

Beberapa rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan infrastruktur IPAL Komunal RW. 01, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta ditinjau dari aspek POSDCORB? 2) Bagaimana penilaian kinerja pengelolaan eksisting infrastruktur IPAL Komunal tersebut? dan 3) Apa saja indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaannya di masa mendatang? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberlanjutan pengelolaan atau manajemen dari aspek lingkungan (ekologi), ekonomi dan sosial di IPAL Komunal RW. 01, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menghubungkan teori administrasi publik terhadap manajemen keberlanjutan IPAL Komunal di Jakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara deskriptif. Dalam prosesnya melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kasus agar dapat lebih riil dilihat bagaimana keterkaitan dan penerapannya secara langsung.

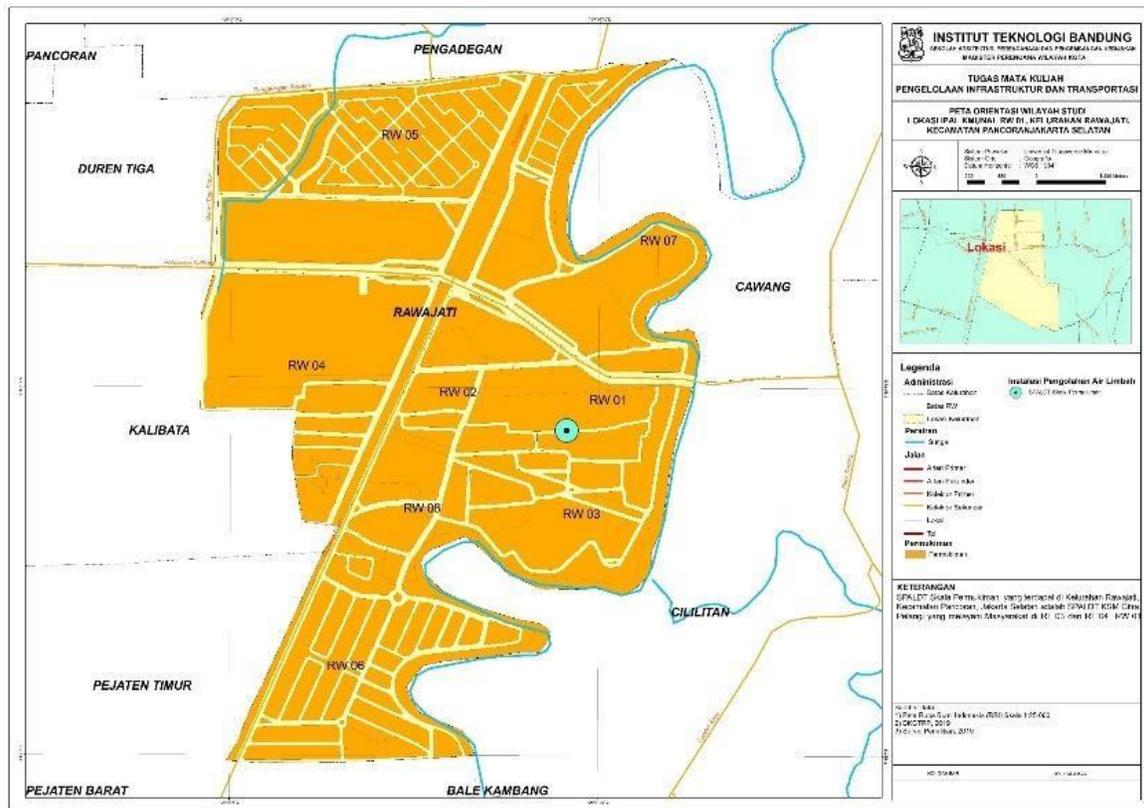
**Gambar 1. Metoda Analisa Data**



*Dari Hasil Analisis, 2019.*

Metodologi penelitian kualitatif menggunakan studi kasus untuk melihat pengembangan konsep keberlanjutan dalam pengelolaan IPAL Komunal di RW.01 Rawajati. Metode analisis kualitatif menurut Junaid (2016) ialah mengkaji suatu realita ataupun fenomena dalam konteks alami, memberikan makna atau menginterpretasi suatu data berdasarkan makna dari suatu studi. Sementara proses wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan mewawancarai tiga orang narasumber secara langsung, observasi dan survei lapangan serta pengumpulan data sekunder agar hasil yang didapatkan menjadi lebih objektif dan relevan sesuai kondisi aslinya. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja pengelolaan eksisting yang diklasifikasikan sesuai aspek pengelolaan POSDCORB dan kemudian diberi bobot serta dinilai pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, peneliti berperan selaku penilai karena merupakan satu-satunya pihak yang memahami konteks teori dan realitas yang terjadi di lapangan.

**Gambar 2. Peta Orientasi Wilayah Studi**



*Dari Dinas CKTRP DKI Jakarta dan Hasil Observasi Lapangan, 2019.*

Penelitian berlokasi di RW. 01, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pemilihan studi kasus ini berdasarkan hasil wawancara terhadap Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, dimana Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) selaku pengelola IPAL

Komunal telah berkinerja baik dalam hal aktif mengumpulkan iuran pemeliharaan IPAL dan terdapat peningkatan jumlah sambungan rumah yang signifikan antara tahun 2017-2019. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di RT. 003, RT. 004, RT. 007 dan RT. 008 di RW. 01 Kelurahan Rawajati adalah berdagang dengan tingkat pendapatan masyarakat pada umumnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Masyarakat di keempat RT ini sebelumnya masih belum memiliki sarana sanitasi dan pembuangan limbah cair rumah tangga yang memadai, sarana drainase lingkungan dijadikan tempat pembuangan limbah dapur dan kamar mandi dialirkan langsung ke Sungai Ciliwung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil studi literatur pada jurnal-jurnal penelitian yang ada, maka selanjutnya dapat diidentifikasi beberapa faktor dominan yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal diketahui hasil perbandingan terhadap indikator yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal ada 4 (empat) indikator yang mendapatkan hasil tergolong tinggi. Indikator dengan skor check list sebesar lima poin ada 1 (satu), yaitu pentingnya peran *stakeholders*, dan 3 (tiga) indikator lainnya dengan skor *check list* empat poin, yaitu biaya perawatan dan pemeliharaan IPAL, desain teknis IPAL, dan aspek sosial (tingkat kesadaran warga). Untuk itu keempat indikator ini selanjutnya akan menjadi bahan analisis yang akan dibandingkan hasil observasi lapangan di wilayah studi. Jika dikaitkan dengan teori pengelolaan menurut Gulick dalam Ahmad (2015) sebelumnya, maka dapat diidentifikasi prinsip pengelolaan atau manajemen IPAL Komunal yang utama yaitu:

1. *Planning, Staffing, Organizing* dan *Coordinating* berkaitan dengan peran *stakeholders*,
2. *Organizing and Budgeting* berkaitan dengan biaya perawatan dan pemeliharaan IPAL,
3. *Planning* berkaitan dengan desain teknis IPAL, dan
4. *Reporting* berkaitan dengan aspek sosial (kepedulian warga).

Selanjutnya akan dibahas komponen pengelolaan IPAL Komunal berdasarkan aspek *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting* (POSDCORB) sebagai berikut, yaitu:

### I. *Planning* (Merencanakan)

Perencanaan IPAL Komunal di RW. 01 dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan dibantu oleh Konsultan Tim Fasilitator Lapangan (TFL). Adapun tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan yang berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Program SANIMAS-IsDB Tahun 2018 terdiri dari:

1. Pelaksanaan Pemetaan Sanitasi Kelurahan  
Data dan informasi yang digali melalui pemetaan ini adalah kondisi wilayah dan kondisi demografi.
2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (*Community Sanitation Improvement Action Plan – CSIAP*)

Setelah dipetakan Sanitasi Kelurahan, Pokja Sanitasi dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) didampingi TFL merumuskan kondisi sanitasi kelurahan, kemudian melakukan penyusunan Dokumen CSIAP.

3. Pelaksanaan Rembuk Kelurahan Tahap II  
Pada tahap ini rembuk diperlukan untuk mengetahui prioritas permasalahan yang ada di kelurahan, menetapkan lokasi yang paling tepat untuk menangani permasalahan, serta melakukan penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang berisi infrastruktur spesifik sesuai dengan kriteria teknis Program SANIMAS.
4. Penentuan Titik Lokasi Partisipatif (Selotif)  
Selotif menggunakan 3 variabel pokok yang secara khusus untuk menentukan lokasi program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Metode Selotif bertujuan untuk menentukan lokasi SANIMAS yang paling memenuhi kaidah petunjuk umum dan potensi keberlanjutan dengan perhitungan cepat yang sistematis dari para perwakilan warga sebagai penerima manfaat di kelurahan sasaran.
5. Pelaksanaan Rembuk Perempuan I Tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)  
Pada fase ini digali secara mendalam aspirasi dan melibatkan aktif kaum perempuan yang diakomodasi oleh TFL.
6. Pelaksanaan Rembuk Warga Tingkat RT/RW Tahap I  
Pada tahap ini diharapkan hasil Pemetaan Selotif dapat direpresentasikan. Dalam pelaksanaannya ditetapkan tim swakelola melalui rembuk warga untuk mengelola infrastruktur ini nantinya, yaitu KSM yang berjumlah angka ganjil untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah.
7. Penyebarluasan/Promosi Sanitasi  
Tahap ini bertujuan meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran warga dalam mengelola lingkungan, khususnya sanitasi dan perannya dalam kehidupan.
8. Pelaksanaan Rembuk RW Tingkat RT/RW Tahap II  
Pada fase ini ini dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang bertugas untuk akan mengelola dan mengawasi operasional infrastruktur IPAL Komunal secara reguler.
9. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)  
Status RKM adalah dokumen resmi berisi kegiatan perencanaan untuk perbaikan sanitasi yang disusun oleh warga. Selain itu merupakan dasar KSM dan KPP untuk mengajukan pencairan biaya atau material operasional dari para pemangku kepentingan.
10. Pengajuan Dokumen RKM  
Pada tahap ini, Kementerian PUPR akan memverifikasi RKM dan dilakukan penyempurnaan usulan dalam RKM bila ada perubahan atau masukan lebih lanjut yang bersumber dari verifikasi Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah Pemprov. DKI Jakarta).

## **II. Organizing (Mengorganisasikan)**

Penetapan KSM Citra Pelangi dilakukan melalui Surat Keputusan Lurah Rawajati, dimana selanjutnya berperan melaksanakan seluruh proses mulai dari perencanaan, pembangunan konstruksi dan kampanye tentang hidup sehat.

## **III. Staffing (Mendelegasikan)**

KPP bersama masyarakat diharapkan dapat memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam merawat dan mengelola IPAL Komunal tersebut. Untuk memperkuat tugas KPP dicantumkan klausul dalam dokumen AD/ART untuk melakukan kegiatan operasional dan pengelolaan. Sesuai Petunjuk Teknis, Ketua KPP tidak diperkenankan merangkap TFL, BKM/LKM ataupun Ketua KSM. Selain itu, pengurus KPP juga tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun demikian, saat ini tidak diketahui secara pasti berapa jumlah anggota KPP yang mengoperasikan IPAL Komunal ini.

## **IV. Coordinating (Mengkoordinasikan)**

KPP selalu berkoordinasi dengan KSM atau BKM di level RW untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi terkait operasional IPAL Komunal. Jika masalah tersebut dapat selesai dengan baik, maka koordinasi berjalan optimal. Namun jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dan perlu dukungan pemerintah, maka perlu koordinasi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada dinas terkait, atau dapat juga via surat yang ditujukan ke dinas tersebut. Selain itu juga dapat diusulkan dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

## **V. Reporting (Melaporkan)**

Salah satu bagian pengawasan dalam pelaksanaan operasional IPAL Komunal adalah pencatatan dan pendokumentasian proses yang terjadi. Catatan atau dokumentasi ini dapat berupa laporan yang dibuat ringkas dan disusun secara berkala. Selain itu BKM selaku pembina juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan, dimana wajib menyampaikan laporan progress pelaksanaan kepada warga melalui rapat atau forum warga lingkup RT/RW serta papan informasi di lokasi RW tersebut setiap maksimal dua minggu secara periodik.

## **VI. Budgeting (Menganggarkan)**

Alokasi biaya merupakan hal terpenting untuk melaksanakan kegiatan. Untuk itu dalam merumuskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) perlu dilakukan dengan cermat dan teliti. Beberapa komponen biaya yang perlu diperhitungkan diantaranya, yaitu: biaya konstruksi, upah, administrasi dan teknis lainnya.

Setelah dilakukan analisis POSDCORB, tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja pengelolaan atau manajemen IPAL Komunal. Sebelum itu, perlu ditetapkan klasifikasi dan bobot penilaian untuk setiap komponen pengelolaan tersebut. Lalu ditetapkan bobotnya mulai angka 1 sampai 3 berdasarkan klasifikasi dalam Buku Petunjuk Teknis SANIMAS-IsDB Tahun 2018. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja pengelolaan IPAL Komunal di RW. 01 ini berdasarkan realita pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai penilai karena merupakan satu-satunya pihak yang mengetahui topik ini secara

komprehensif setelah melakukan studi literatur dan observasi di lapangan. Untuk mempermudah penilaian, perlu diidentifikasi dulu *range* penilaian kinerja pengelolaan terhadap bobot tersebut. Jika total nilai berjumlah antara 1 – 7 maka komponen tersebut tergolong berkinerja rendah, jika total penilaian antara 8 – 14 berkinerja sedang, dan jika total nilai meraih angka antara 15 – 21 maka dapat digolongkan berkinerja tinggi. Untuk lebih lanjut, penilaian kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Penilaian Kinerja Pengelolaan IPAL Komunal RW.01 Kel. Rawajati**

No.	Komponen Pengelolaan	Penilaian Kinerja
1	<i>Planning</i>	3
2	<i>Organizing</i>	2
3	<i>Staffing</i>	1
4	<i>Directing</i>	2
5	<i>Coordinating</i>	3
6	<i>Reporting</i>	2
7	<i>Budgeting</i>	1
Total Penilaian Kinerja Pengelolaan		<b>14</b>

*Dari Hasil Analisis, 2019.*

Hasil perhitungan yang ada dalam Tabel 1 menunjukkan jumlah total penilaian kinerja pengelolaan IPAL Komunal RW. 01 ini mendapat nilai 14. Hal ini berarti pengelolannya berkinerja sedang. Adapun beberapa komponen pengelolaan yang dinilai tinggi (angka 3) adalah *planning* dan *coordinating*. Kemudian terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu *organizing*, *directing* dan *reporting* secara total mendapat nilai sedang (angka 2). Sementara komponen *staffing* dan *budgeting* mendapatkan nilai rendah (angka 1).

Sementara itu, komponen yang termasuk dalam indikator pentingnya peran serta *stakeholders* secara berturut-turut memiliki nilai 3, 1, 2, dan 3 yang sebagian komponennya mendapatkan nilai tinggi, maka diketahui bahwa peran serta *stakeholders* dalam pengelolaan IPAL Komunal di RW. 01 tergolong baik dan keberlanjutan dalam pengelolannya berpotensi tinggi untuk diteruskan. Sedangkan komponen pengelolaan yang termasuk indikator biaya perawatan dan pemeliharaan IPAL memiliki nilai 2 dan 1, yang berarti aspek biaya perawatan dan pemeliharaan masih belum menjadi prioritas dalam pengelolaan IPAL Komunal RW. 01. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu untuk komponen pengelolaan yang termasuk indikator desain teknis IPAL memiliki nilai 3 yang berarti tergolong baik dalam pelaksanaannya dan dapat mendukung pengelolaan IPAL yang berkelanjutan. Sementara untuk komponen pengelolaan yang termasuk indikator aspek sosial (kepedulian warga) mendapat nilai 2 yang dapat berarti cukup baik dan berpotensi untuk ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal.

Selanjutnya dilakukan analisis limitasi/kendala menurut Naipospos (2019) dari pengelolaan IPAL Komunal RW.01 ini berdasarkan studi literatur. Untuk itu selanjutnya peneliti mengidentifikasi dan mengelaborasi masing-masing jenis limitasi tersebut dalam pengelolaan IPAL Komunal ini sesuai dengan teori POSDCORB. Jenis limitasi/kendala dalam pengelolaan dapat dibagi ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu: administrasi, ekonomi, sosio-kultural, institusional, legal dan komitmen. Hasil analisisnya yaitu untuk kendala yang paling banyak dihadapi dari seluruh rangkaian pengelolaan adalah kendala administrasi (6 komponen), institusional, politik, serta legal dan komitmen (4 komponen), sosio-kultural (3 komponen) dan ekonomi (2 komponen).

### Kesimpulan

Penelitian mengenai keberlanjutan IPAL Komunal di Provinsi DKI Jakarta perlu mengakomodasi indikator peran *stakeholders*, biaya perawatan dan pemeliharaan IPAL, desain teknis IPAL, dan aspek sosial yang berkaitan dengan tingkat kesadaran warga terhadap infrastruktur IPAL Komunal. Beberapa indikator keberlanjutan ini telah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan KPP yang mengelola IPAL Komunal sehari-hari.

Penerapan teori administrasi publik POSDCORB dalam studi kasus IPAL Komunal RW.01 ini memiliki kinerja pengelolaan yang tinggi (bernilai 3) untuk komponen *Planning* dan *Coordinating*, yang berarti pengembangan IPAL Komunal telah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik. Sementara kinerja pengelolaan yang tergolong sedang (bernilai 2) terdapat pada komponen *Organizing*, *Directing* dan *Reporting*, yang berarti ketiga komponen ini berjalan cukup baik namun masih dapat ditingkatkan lagi kinerjanya. Kemudian kinerja pengelolaan yang tergolong rendah (bernilai 1) terdapat pada komponen *Staffing* dan *Budgeting*, dimana pendelegasian pekerjaan dan sumber biaya perawatan dan pemeliharaan IPAL Komunal merupakan komponen yang perlu segera ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama antara Pemerintah dan KPP.

Sementara hasil analisis limitasi/kendala komponen POSDCORB diketahui bahwa jenis kendala yang paling banyak dihadapi adalah administrasi dan yang paling sedikit adalah ekonomi. Untuk itu dalam pengembangan IPAL Komunal RW.01 akan lebih berkelanjutan jika perencanaan melibatkan peran *stakeholders* secara kolaborasi terutama terkait komponen *Staffing* dan *Budgeting* serta tertib administrasi dari awal perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan IPAL Komunal. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan IPAL Komunal lainnya di Provinsi DKI Jakarta pada khususnya, maupun kota-kota lain di Indonesia pada umumnya.

### Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber penelitian ini, yaitu Ketua RT.03 yang juga selaku Ketua KPP Citra Pelangi dan perwakilan

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya sebagai penyedia data sekunder yang sangat bermanfaat untuk penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Adnyana, I Gede, Wiryawan, I Wayan Gde. et al. 2020. Community Participation on Wastewater Treatment Plant Development in Bajera Village. *International Journal of Applied Science and Sustainable Development*. Volume 2 No. 2. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/IJASSD/article/view/1187/1016>.
- Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Altın S, Altın A, Doğru S. 2020. Investigation of operating costs at an urban wastewater treatment plant. *Turk Hij Den Biyol Derg*; 77 (EK4: Su ve Sağlık): 49-56. <https://doi.org/10.5505/TurkHijyen.2020.74875>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011. Buku Putih Sanitasi Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bappenas: Kualitas 13 Sungai di Jakarta Buruk, Lihat Pakai Drone Airnya Hitam diperoleh melalui situs internet <https://megapolitan.kompas.com>. Diakses 16 Februari 2022.
- Brix, Hans, Koottatep, Thammarat, et al. 2011. The Flower and The Butterfly Constructed Wetland System at Kho Phi Phi-System Design and Lesson Learned during Implementation and Operation. *Journal Elsevier*. <https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.06.035>.
- Chirisa, Innocent, Bandaiko, Elmond, et al. 2016. Decentralized Domestic Wastewater System in Developing Countries: the Case Study of Harare, Zimbabwe. *Jurnal Springer*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13201-016-0377-4>.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018. Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD) Tahun 2018. Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Haldar, K., Kujawa-Roeleveld. K., et al. 2021. Institutional Challenges and Stakeholder Perception Towards Planned Water Reuse in Peri-urban Agriculture of the Bengal Delta. *Journal Elsevier*. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111974>.
- Hendrawan, D., Widanarko, Sulistyoweni, dkk. 2013. Evaluation of Centralized WWTP and the Meed of Communal WWTP in Supporting Communal-Based Sanitation in Indonesia, *European Scientific Journal*, Volume 9, No. 17, <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1168>.
- Junaid, Ilham, Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, Volume 10, No. 01 Februari 2016, Halaman 59 – 74. P3M Politeknik Pariwisata Makassar. ISSN 1979 – 7168.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2018. Buku Petunjuk Teknis Program SANIMAS-IsDB. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Marleni, Ni Nyoman Nepi, Raspati, Gema Sakti. 2020. A Critical Review of Wastewater Resource Recovery Implementation in Indonesia. *Journal of the Civil Engineering Forum*. <https://doi.org/10.22146/jcef.52655>.
- Naipospos Binsar. 2019. *Infrastructure & Transport Management : Constraints*. Bandung: Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- OECD Water Governance Initiative. 2015. *Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance*. Korea: OECD Territorial Development Policy Committee.
- Padilla-Rivera, A., Morgan-Sagastume, J., Noyola, A., Güereca L. 2014. Addressing Social Aspects Associated with Wastewater Treatment Facilities. *Environmental Impact Assessment Review*. Volume 57, February 2016, Pages 101-113. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2015.11.007>.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Rande, Santi. 2017. Evaluasi Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Batu Cermin RT.06, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda. *Jurnal Paradigma*, Vol. 6 No. 1. <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v6i1.443>.
- Saad, Dalia & Byrne, Deirdre & Drechsel, Pay. 2017. *Social Perspectives on the Effective Management of Wastewater*. <https://doi.org/10.5772/67312>
- Sawitri Dewi. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- Surat Keputusan Gubernur No. 643 Tahun 2015 tentang Pembentukan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank (SANIMAS-IsDB) Tahun 2015-2018.
- Surat Keputusan (SK) Lurah Rawajati No. 40 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Citra Pelangi Mas Bakti 2016-2017.
- Tambun, Lenny Tristia. Air Sungai Jakarta Tak Layak Konsumsi diperoleh melalui situs internet <https://www.beritasatu.com/nasional/510645/air-sungai-jakarta-tak-layak-konsumsi>. Diakses 16 Februari 2022.
- Tumwebaze, I.K.; Rose, J.B.; Hofstra, N.; Verbyla, M.E.; Okaali, D.A.; Katsivelis, P.; Murphy, H.M. 2021. Bridging Science and Practice-Importance of Stakeholders in the Development of Decision Support: Lessons Learned. *Sustainability*, 13, 5744. <https://doi.org/10.3390/su13105744>.
- Türkmenler, Harun and Aslan, Mustafa. 2017. An evaluation of operation and maintenance costs of wastewater treatment plants: Gebze wastewater treatment plant sample. *Desalination and Water Treatment*. <https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20691>



United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES). 2019. *Towards Sustainable Wastewater Treatment Systems*. Dresden: UNU-FLORES.

Xiaoxin, Zhang et. al. 2018. *Study on Evaluation Index System of Operational Performance of Municipal Treatment Plants in China*, Beijing: IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*.  
<https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/153/6/062018>.